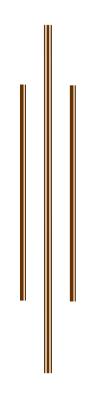


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024



DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BOYOLALI

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKiIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali Tahun 2024 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJiP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2024 sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupupaten Boyolali Tahun 2024 mengacu pada RPJMD Tahun 2021 -2026. Dalam hal ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja dan berperan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Boyolali melalui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kabupaten Boyolali Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disepakati di awal tahun anggaran.

Dokumen ini berisi informasi tentang perencanaan kinerja yang tertuang dalam beberapa dokumen, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja serta mengemukakan juga permasalahan, upaya pemecahan dan saran. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan, utamanya dalam rangka meningkatkan kinerja ke depan.

Kami menyadari, bahwa masih banyak kekurangan pada akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali, baik dari aspek kinerja maupun penyajian laporan ini, oleh karena itu kami berharap adanya masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya.

> Boyolali, 31 Januari 2025 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI

PURNAWAN RAHARJO, S.Pd., M.M. Pembina Utama Muda

NIP. 19690414-199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	ii
DAFT	AR ISI	iii
DAFT	AR TABEL	iv
DAFT	AR LAMPIRAN	v
IKHTIS	SAR EKSEKUTIF	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Gambaran Organisasi	2
1.3	Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi	5
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1.	Perencanaan Strategis Organisasi	6
2.2.	Perjanjian Kinerja	7
BAB II	I AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1.	Capaian Kinerja Organisasi	9
3.2	Realisasi Anggaran	19
BAB I\	/ PENUTUP	22
4.1	Simpulan	22
4.2	Saran	22
43	Tindak lanjut atas rekomendasi	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan4
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang4
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural4
Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kab Boyolali Tahun 20248
Tabel 3. 1 Pencapaian Kinerja Sasaran 11
Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja Sasaran 111
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 111
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Akhir Periode
RPJMD12
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Realisasi
Nasional12
Tabel 3. 6 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Boyolali 2017 -202413
Tabel 3. 7 Program kegiatan untuk mencapai sasaran 114
Tabel 3. 8 Pencapaian Kinerja Sasaran 216
Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 216
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Akhir Periode
RPJMD16
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Realisasi
Nasional16
Tabel 3. 12 Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah DPMPTSP Kabupaten
Boyolali17
Tabel 3. 13 Program Kegiatan untuk mencapai sasaran 218
Tabel 3. 14 Alokasi dan Realisasi Anggaran20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali.
Lampiran 2	Cascade down IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
	Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali 2021-2026
Lampiran 3	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali Tahun 2024
Lampiran 4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Lampiran 5	Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal
	dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali Tahun
	2024
Lampiran 6	Laporan Monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi Dinas
	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
	Boyolali Tahun 2024
Lampiran 7	Laporan Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali Tahun 2024
Lampiran 8	Penghargaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
	Satu Pintu Kabupaten Boyolali Tahun 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKJIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Visi Bupati Boyolali adalah "Boyolali Maju, meneruskan Pro Investasi" (Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)). Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melaksanakan visi Bupati Boyolali melalui Misi ke satu Yaitu Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi Dan Berkelanjutan; dengan sasaran Meningkatnya nilai investasi dan Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah serta IKU Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dan nilai SAKIP yang dijabarkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan Misi tersebut, pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali melaksanakan sejumlah 6 (enam) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 4.903.787.000

Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan adalah 133,36 %. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 2 (dua) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja 91% keatas dengan kategori sangat tinggi. Berikut Capaian Kinerja per Sasaran:

- Sasaran "Meningkatnya nilai investasi" dengan rata- rata capaian kinerjanya 166,36 %
- 2. Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah." dengan rata- rata capaian kinerjanya 100,36 %

Secara keseluruhan, capaian kinerja dari 2 (dua) indikator kinerja utama sebesar 133,36 % (kategori sangat tinggi). Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2024 termasuk belanja pegawai adalah sebesar Rp 4.903.878.000 terealisasi Rp 4.819.139.730 atau 98,27 %.

Dalam rangka mencapai kinerja tersebut terdapat tantangan/hambatan dan peluang/faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Tantangan/Hambatan

- a. Ketersediaan lahan untuk peruntukan industri di wilayah Kawasan Peruntukan Industri
- b. Miss Match antara Kompetensi dan Ketersediaan Tenaga Kerja
- c. Adanya kendala sistem OSS RBA di BKPM dan help Desk OSS RBA di BKPM yang agak lambat.
- d. Waktu penyusunan dokumen bersamaan dengan pekerjaan lain di bidang perencanaan dan pelaporan, yaitu di awal tahun.

1. Peluang/ Faktor Pendukung

- a. Pendampingan percepatan realisasi investasi.
- b. Promosi investasi yang focus dan efektif.
- c. Optimalisasi Potensi Investasi.
- d. Peningkatan iklim penanaman modal melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
- e. Penyediaan infrastruktur ekonomi.
- f. Terjalinnya Kemitraan antara pemerintah,Investor menengah dengan usaha industry Mikro Kecil.
- g. Pengendalian inflasi.
- h. Optimalisasi investasi di wilayah Utara.
- i. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- j. Kehadiran Mal Pelayanan Publik Digital Boyolali dapat mendongkrak kemudahan berusaha di Boyolali melalui penyediaan layanan perizinan dan non perizinan yang terpadu sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Mal Pelayanan Publik Boyolali mampu menarik dan memfasilitasi investor dari berbagai level untuk menanamkan modalnya. Hal ini karena pelayanan publik sangat mempengaruhi minat pelaku ekonomi atau investor untuk berinvestasi
- k. Telah dilaksanakannya bimbingan teknis penyusunan SAKIP, Renstra dan RPJMD sehingga indikator dalam IKU selaras.
- I. Telah disusun indikator dan rencana aksi individu.
- m. Dalam Penyusunan anggaran telah menggunakan SIPD.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2024, Perangkat Daerah menyusun LKjIP 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Perangkat Daerah. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

- sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja DPMPTSP dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
- 2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- 3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LkjIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain :

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021;
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 17);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
- 7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;
- Peraturan Bupati Boyolali Nomor 100 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Kabupaten Boyolalidan pearngkat Daerah Di Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2026.

1.2 Gambaran Organisasi

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali sesuai Peraturan Bupati Boyolali Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali adalah tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali terdiri dari :

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali.
- 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali merupakan subyek dalam pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Berikut gambaran kondisi Sumber Daya Manusia berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat dan Golongan ruang dan jabatan.

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan

Jenis	PNS (Non	Fasianal	DDDIA	DTT	T.	lainmus	lumalah
Pendidikan	Fungsional)	Fungsional	PPPK	PII	INL	lainnya	Jumlah
S3							
S2	3	3					
S1/D4	2	7	1		5		
D1-D3	3				1		
SMA	1				6		
SMP							
SD	1						
Jumlah	11	10	1		12		

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Utama Madya	IV/d		
2	Pembina Utama Muda	IV/c	1	
3	Pembina Tingkat I	IV/b	1	1
4	Pembina	IV/a		2
5	Penata Tingkat I	III/d	1	5
6	Penata	III/c	1	1
7	Penata Muda Tingkat I	III/b		1
8	Penata Muda	III/a	1	
9	Pengatur Tingkat I	II/d	3	1
10	Pengatur	II/c		
11	Pengatur Muda Tingkat I	II/b		
12	Pengatur Muda	II/a		
13	Juru Tingkat I	I/d	1	
14	Golongan IX	IX	1	

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Nama Jabatan	Jumlah	
NO	Nama Japatan	Laki-laki	Perempuan
1	Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon 2)	1	
2	Jabatan Administrator (Eselon 3)	1	
3	Jabatan Pengawas (Eselon 4)		1
4	Jabatan Pelaksana (Staf)	7	5
5	Jabatan Fungsional	3	7

1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2021-2026, dan isu utama terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali, yaitu:

- Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di bidang usaha unggulan daerah;
- 2. Tersedianya informasi peluang usaha unggulan;
- Meningkatkan citra Kabupaten Boyolali sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan mendorong minat calon investor untuk berinvestasi di KabupatenBoyolali;
- 4. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam meningkatkan pelayanan prima di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- 5. Menyusunan dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan daya saing dan pro investasi.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- Fasilitasi Dokumen Perizinan, yaitu meliputi penerapan OSS RBA, Help desk OSS RBA yang kurang responsive dan benturan regulasi dalam pelayanan perizinan (Kementrian, Provinsi, Kabupaten)
- Ketersediaan Lahan, yaitu meliputi ketersediaan lahan sesuai dengan Kawasan Peruntukan Industri, Luas lahan dalam satu hamparan dan peruntukan lahan (Sesuai RT RW/ RDTR)
- 3. Detail Proyek investasi yang ditawarkan kepada investor.
- Ketersediaan Tenaga Kerja, yaitu meliputi jumlah tenaga kerja dan sebarannya, Miss Match antara kompetensi yang dibutuhkan dan ketersediaan tenaga kerja yang ada.

BABII

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Organisasi

Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali 2021-2026 sebagai berikut:

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2021–2026) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah "Boyolali Maju, meneruskan Pro Investasi" (Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)).

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Boyolali, telah menetapkan 5 Misi sebagai berikut:

- 1) Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi Dan Berkelanjutan;
- 2) Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter Dan Berbudaya;
- 3) Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional;
- 4) Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Terpercaya; dan
- 5) Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri Dan Berdaya Saing.

Dari ke lima misi tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mendukung Misi pertama yaitu Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi Dan Berkelanjutan.

Misi ini berorientasi pada penyediaan sistem layanan investasi yang kondusif guna meningkatkan daya tarik bagi investor dan kenaikan nilai investasi, dalam koridor investasi berwawasan keberlanjutan lingkungan hidup. Misi pro investasi dimaksudkan mendinamisir dunia usaha, aktivitas perekonomian dan hubungan industrial yang berwawasan lingkungan, misi ini sebagai dasar kebijakan yang mensinergikan tumbuhnya investasi dengan keberlanjutan lingkungan. Pertumbuhan investasi di kabupaten Boyolali disinergikan dengan upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah.

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 mempunyai tujuan Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dengan sasaran sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya nilai investasi.
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Semua sasaran dengan indikator sejumlah dua dijabarkan lebih lanjut ke dalam program sejumlah 6 (enam) dan kegiatan sejumlah 10 (sepuluh) Keseluruhan penjabaran tersebut tertuang dalam cascading IKU sebagaimana terlampir.

2.2. Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2024 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Boyolali 2024 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024. Perjanjian Kinerja meliputi 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya nilai investasi.
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali Tahun 2024 :

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kab Boyolali Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Koordinator
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya nilai investasi	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp 1.830.706.930.000	Semua Bidang
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara an Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP DPMPTSP	82,90	Sekretaris

Sumber: DPMPTSP Kab Boyolali, 2025

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 4.903.787.000 yang selangkapnya sebagaimana dokumen Penetapan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Perubahan (terlampir).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan kewajiban Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.

- Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2024, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus:

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

Capaian Indikator
$$Kinerja = \frac{Rencana - (Realisasi-Rencana)}{Rencana} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 5 (lima) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

No	Capaian kinerja	Kategori
1.	91 % keatas	Sangat tinggi
2	76 – 90 %	Tinggi
3	66 – 75 %	Sedang
4	51 – 65 %	Rendah
5	50 % kebawah	Sangat rendah

Pengukuran kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya atau beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir periode RPJMD, dan apabila memungkinkan membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja secara nasional. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja. Secara rinci pencapaian sasaran diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran/ Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Target 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi 2024	Realisasi Nasional
Sas	aran1: Meni	ngkatnya	Nilai Investas	si		
1	Realisasi	9.153.534.	1.830.706.930.000	1.937.439.	3.045.473.744.959	1.714.200.000.
	Penanaman	640.000		740.864		000.000
	Modal					
	Dalam					
	Negeri					
	(PMDN)					
	dan					
	Penanaman					
	Modal					
	Asing					
	(PMA)					
Sasa	Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah					
2	Nilai SAKIP DPMPTSP	83,4	82,9	82,75	83,20	87,7

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali, 2025

Analisa Capaian Kinerja

Berdasar Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) Indikator sebagai indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut:

1) Sasaran 1. Meningkatnya Nilai Investasi

Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal	1.830.706.930.000	3.045.473.744.959	166,36 %
Asing (PMA)			

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali, 2025

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2024		Realisasi
Utama	1 a. got 202 1	2023	2024
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)	1.830.706.930.000	1.937.439. 740.864	3.045.473.744.959

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali, 2025

Tabel 3. 4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja	Target Akhir Periode	Realisasi sampai	Progres
Utama	RPJMD 2026	dengan 2024	
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)	9.153.534.640.000	10.096.315.921.659	110,29 %

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali, 2025

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Realisasi Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun	Realisasi Nasional	Keterangan
Utama	2024	Tahun 2024	
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)	3.045.473.744.959	1.714.200.000. 000.000	Investasi Boyolali berkontribusi 0,17 % terhadap investasi nasional

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali, 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 166,36 % dari target sebesar Rp 1.830.706.930.000 terealisasi sebesar Rp 3.045.473.744.959

Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 57,10 %, dimana realisasi tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.937.439. 740.864

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami progres sebesar 110,29 %.

Sedangkan jika dibandingkan dengan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) secara nasional maka Kabupaten Boyolali memberikan kontribusi realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam hal ini realisasi nasional sebesar 0,17 %.

Perkembangan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dari Tahun 2021 sampai dengan 2024 realisasi PMDN dan PMA Kabupaten Boyolali selalu mengalami kenaikan yang signifikan, hal itu sejalan dengan Visi Kabupaten Boyolali yaitu Boyolali Maju, meneruskan Pro Investasi" (Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas.

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 3. 6
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal
Asing (PMA) Kabupaten Boyolali 2021 -2024

TAHUN	REALISASI INVESTASI
2021	1.988.107.934.178
2022	3.125.294.501.658
2023	1.937.439.740.864
2024	3.045.473.744.959

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali, 2025

Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah sebagai berikut:

- 1) Pendampingan percepatan realisasi investasi.
- 2) Promosi investasi yang focus dan efektif.
- 3) Optimalisasi Potensi Investasi.
- 4) Peningkatan iklim penanaman modal melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
- 5) Penyediaan infrastruktur ekonomi.
- 6) Terjalinnya Kemitraan antara pemerintah, Investor menengah dengan usaha industri Mikro Kecil
- 7) Pengendalian inflasi.
- 8) Optimalisasi investasi di wilayah Utara.
- 9) Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- 10) Kehadiran Mal Pelayanan Publik Boyolali dapat mendongkrak kemudahan berusaha di Boyolali melalui penyediaan layanan perizinan dan non perizinan yang terpadu sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Mal Pelayanan Publik Boyolali mampu menarik dan memfasilitasi investor dari berbagai level untuk menanamkan modalnya. Hal ini karena pelayanan publik sangat mempengaruhi minat pelaku ekonomi atau investor untuk berinvestasi

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- Ketersediaan lahan untuk peruntukan industri di wilayah Peruntukan Industri;
- 2) Miss Match antara Kompetensi dan Ketersediaan Tenaga Kerja;
- Adanya kendala sistem OSS BKPM dan help Desk OSS di BKPM yang kurang responsiv.

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

- 1) Fasilitasi Penyediaan Lahan sesuai dengan peruntukannya/Tata Ruang
- 2) Penyediaan Balai Latihan Kerja sesuai dengan industri terkait
- Melakukan pendampingan dan koordinasi dalam penerapan OSS dengan Kementrian Investasi /BKPM

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), dilaksanakan melalui tabel berikut ini :

Tabel 3. 7
Program kegiatan untuk mencapai sasaran 1

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi potensi investasi yang ditindak lanjuti dengan penjajakan kerjasama investasi	35 %	35 %	100 %
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan promosi penanaman modal	2 kegiatan	2 Kegiatan	100 %
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	65 %	65 %	100 %
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen fasilitas /Insentif Di bidang penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Boyolali	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM Perizinan Investasi	Nilai 84,50	Nilai 88,23	104,41 %
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan	5200 izin usaha	5800 izin usaha	111,54 %
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan	100 %	100 %	100 %
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Kali	2 Kali	100 %
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan perusahaan yang tertib pelaporan LKPM	21 %	50.63 %	241.09 %
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sumber: DPMPTSP Kab	Jumlah Pelaporan LKPM	40 Perusahaan	121 Perusahaan	302,5 %

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali, 2025

Dari sisi pembiayaan disediakan anggaran sebesar Rp 803.883.000 dan terealisasi Rp 764.860.050 dengan realisasi anggaran sebesar 95,14 %. Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis.

Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa komputer, laptop, printer, scan, alat tulis kantor dan kendaraan dinas telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah.

2) Sasaran 2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tabel 3. 8 Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Nilai SAKIP DPMPTSP	82,9	83,2	100,36 %

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali, 2025

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi		
		2023	2024	
Nilai SAKIP DPMPTSP	82,90	82,75	83,20	

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali, 2025

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja	Target Akhir Periode	Realisasi sampai	Progres
Utama	RPJMD 2026	dengan 2024	
Nilai SAKIP DPMPTSP	83,4	83,2	99,76 %

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali, 2025

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Realisasi Nasional

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional	Keterangan
Nilai SAKIP DPMPTSP	83,2	87,7	

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali, 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Meningkatnya Akuntabilitas daerah tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100,36 % dari target sebesar 82,90 terealisasi sebesar 83,20.

Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 0,54 %, dimana realisasi tahun 2023 adalah sebesar 82,75

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah mengalami progres sebesar 99,76 %

Sedangkan jika dibandingkan dengan Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah se Kabupaten Boyolali maka DPMPTSP Kabupaten Boyolali lebih rendah sebesar 5,1 % dalam hal ini realisasi tertinggi di Kabupaten Boyolali yaitu nilai AKIP Disperkim sebesar 87,7

Perkembangan realisasi Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan daerah DPMPTSP Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 realisasi Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah DPMPTSP Kabupaten Boyolali selalu mengalami kenaikan.

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 3. 12 Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah DPMPTSP Kabupaten Boyolali

TAHUN	NILAI SAKIP
2020	82,18
2021	82,03
2022	82,30
2023	82,75
2024	83,20

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali, 2025

Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah DPMPTSP Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

- Telah dilaksanakannya bimbingan teknis penyusunan SAKIP, Renstra dan RPJMD sehingga indikator dalam IKU selaras.
- 2) Telah disusun indikator dan rencana aksi individu
- 3) Dalam Penyusunan anggaran telah menggunakan SIPD

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

Waktu penyusunan dokumen bersamaan dengan pekerjaan lain di bidang perencanaan dan pelaporan,yaitu di awal tahun.

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

Adanya JFU pelaksana yang membidangi perencanaan dan pelaporan, sehingga semua dokumen dapat diselesaikan bersamaan di awal tahun.

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah DPMPTSP Kabupaten Boyolali dilaksanakan melalui tabel berikut ini

Tabel 3. 13
Program Kegiatan untuk mencapai sasaran 2

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 %	100 %	100 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Kegiatan	7 kegiatan	100 %

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali, 2025

Dari sisi pembiayaan disediakan anggaran sebesar Rp 4.099.904.000 dan terealisasi Rp 4.054.279.680 dengan capaian 98,88 %.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa komputer, laptop, printer, scan, alat tulis kantor dan kendaraan dinas telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 mencapai **Rp 4.819.139.730**,- atau **98,27** % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 4.903.787.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 84.647.270 ,- atau 1,73 %. Rincian realisasi belanja sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 14 Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	55.000.000	54.861.200	99,75%
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	54.861.200	99,75%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	35.000.000	34.980.000	99,94%
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	35.000.000	34.980.000	99,94%
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	30.000.000	29.859.000	99,53%
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	30.000.000	29.859.000	99,53%
4	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100.000.000	99.607.850	99,61%
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	99.607.850	99,61%
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	583.883.000	545.552.000	93,44%
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	583.883.000	545.552.000	93,44%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.099.904.000	4.054.279.680	98,89%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.037.526.000	3.027.963.125	99,69%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	369.263.250	350.578.991	94,94%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	277.600.000	265.131.000	95,51%
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.908.000	198.024.674	99,06%
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.606.750	212.581.890	98,60%
	TOTAL	4.903.787.000	4.819.139.730	98,27%

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali, 2025

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masuk dalam kategori sangat tinggi. Berikut simpulan capaian kinerja per sasaran:

- 1. Sasaran "Meningkatnya nilai investasi" capaian kinerja 166,36 % dalam ketegori sangat tinggi meliputi 1 (satu) indikator.
- 2. Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah" capaian kinerja 100,36 % dalam ketegori sangat tinggi meliputi 1 (satu) indikator.

4.2 Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja serta meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program/ kegiatan dalam mencapai target kinerja, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

- a. meningkatkan kualitas SDM dalam hal PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
- b. meningkatkan pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat dengan menggunakan segala sumber daya yang ada;
- c. meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik untuk meningkatkan kualitas aplikasi perizinan online.

4.3 Tindak lanjut atas rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja tahun 2023, maka Dinas Penanaman Modal Kabupaten Boyolali telah melaksanakan perbaikan sebagai berikut:

a. Telah menyelaraskan target capaian kinerja antara dokumen RPJMD, Renstra, Dokumen IKU,dan Lkjip tahun 2024.

Boyolali, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI

PURNAWAN RAHARJO, S.Pd., M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19690414 199403 1 007

LKjIP DPMPTSP Kabupaten Boyolali 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 910 /00621TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 265);
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- Peraturan Bupati Boyolali Nomor 100 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Penjabaran Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dituangkan dalam *cascade* Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Indikator Kinerja Utama dan *cascade* Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA merupakan acuan kinerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

KEEMPAT

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Boyolali.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada tanggal Januari 2022 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DPMPTSP E

PURNAWAN RAHARJO, S.Pd., M.M.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 910 /00667 Tahun 2022

TANGGAL: 10 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021-2026

Tugas : membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Fungsi : a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

NO	SASARAN	INDIKATOR	PEN	NJE	CLASAN		PENGAMPU
	STRATEGIS	KINERJA					
1	2	3			4		5
1	Meningkatnya	Realisasi	Formulasi	:	Realisasi		Semua
	nilai investasi	penanaman	Penghitungan		investasi	PMDN	Bidang
		modal			dan PM	A tahun	
		Dalam			berjalan		×
		Negeri dan	Tipe	:	Non kom	ulatif	
		Penanaman	penghitungan				
		Modal	Sumber data	:	Kemente	rian	
		Asing			Investas	i/BKPM	
2	Meningkatnya	Nilai SAKIP	Formulasi	:	Hasil	Evaluasi	Sekretariat
	Kapasitas	Perangkat	Penghitungan		SAKIP	dari	
	kelembagaan	Daerah			Inspekto	rat	
	Perangkat				Daerah		
	daerah		Tipe	:	Non Kon	nulatif	
		-	penghitungan				
			Sumber data	:	Inspekto	rat	
					Daerah		

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLALI

DPMPTSP

PURNAWAN RAHARJO, S.Pd., M.M.

01

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR: 910 /00667 Tahun 2022

TANGGAL: (1) Januari 2022

CASCADE INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021-2026

	N Sasaran				7	arge	et						7	`arge	et						7	l'arge	et						7	Γarge	et	
N		Indikator Kinerja Utama	Baseli ne 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Base line 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Basel ine 2020	2022	2023	Target	2026	
1	Meningk atnya nilai investasi	Realisasi Penanam an Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam an Modal Asing (PMA) (dalam juta rupiah)	1675 461,7	1 7 1 1 5 1 1,5 9	1 7 7 1 1 0 9 , 2 6	1 8 3 0 7 0 6 , 9 3	1 8 9 0 3 0 4, 6	1 9 4 9 9 0 2 , 2 6	Program Promosi Penanam an Modal	Persentas e promosi potensi investasi yang ditindak lanjuti dengan penjajaka n kerjasam a investasi	25	3 0	3 5	4 0	4 5	5 0	Penyelen ggaraan Promosi Penanam an Modal yang menjadi Kewenan gan Daerah Kabupat en/Kota	Jumlah Kegiata n promosi penana man modal		3 k e g	3 k e g	3 k e g	3 k e g	3 k e g	Pelaksanaa n Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Kegiatan promosi penanama n modal		2 k e g	2 k e g	k e	k e	2 k e g
																									Penyusuna n Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi promosi penanama n modal		1 d o k	1 d o k	1 d o k	1 d o k	1 d o k
									Program Promosi Penanam an Modal	Persentas e realiasi investasi di wilayah utara	29	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4										Jumlah Kemitraan antara industri besar dan UMKM		1 k e g	1 k e g	1 k e g	1 k e g	1 k e g

						7	arge	et					Т	arget							Т	arge	t						Т	arge	et .	
- 1	N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseli ne 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	Basel ine 2020	2023	2023 2024 2025 2026	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Base line 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026		
										Program Pengemb angan Iklim Penanam an Modal	Persentas e peningka tan potensi investasi yang teridentifi kasi	50	6 3	6 5	7 1	7 5	Penetapa n Pemberia n Fasilitas /Insentif Dibidang Penanam an Modal yang menjadi Kewenan gan Daerah Kabupat en/Kota	Jumlah Dokum en fasilitas /Insent if Di bidang penana man Modal		1 d o k	1 d o k	1 d o k	1 d o k	1 d o k	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/In sentif dan Kemudaha n Penanaman Modal	Jumlah Dokumen pemberian fasilitas/in sentif dan kemudaha n penanama n modal		1 d o k	1 d o k	1 d o k	1 d o k	1 d o k
																									Evaluasi Pelaksanaa n Pemberian Fasilitas/In sentif dan Kemudaha n Penanaman Modal	jumlah laporan evaluasi pelaksanaa n pemberian fasilitas / insentif dan kemudaha n penanama n modal		4 l a p o r a n	4 la p o r a n	4 la p o r a n	4 la p o r a n	4 la p o r a n
																	Pembuat an Peta Potensi Investasi Kabupat en/Kota	Jumlah Dokum en Peta Potensi Investa si		1 p a k e t	1 p a k et	1 p a k et	1 p a k et	1 p a k et	Penyusuna n Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanama n Modal Kabupaten Boyolali		0	0	0	0	0

N o						Tar	get						Т	`arge	et						7	Γarge	et						Т	`arge	et	
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseli ne 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Base line 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026
																									Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi		1 p a k e t	1 p a k et	1 p a k et	1 p a k et	1 p a k et
																										Jumlah profil investasi		1 p a k e t	1 p a k et	1 p a k et	1 p a k et	1 p a k et
									Program Pelayana n Penanam an Modal	IKM Perizinan Investasi	82,46	8 2 , 5 5 5	83,5	8 4 , 5 5	8 5	8 6	Pelayana n Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanam an Modal yang menjadi Kewenan gan Daerah Kabupat en/ Kota	Jumlah Penerbi tan perizina n dan non perizina n		1 0 0 0 0 i z i n u s a h a	1 1 0 0 0 iz i n u s a h a	1 2 0 0 0 iz i n u s a h a	1 3 0 0 0 iz i n u s a h a	1 4 0 0 0 iz i n u s a h a	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizin an berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Konsultasi perizinan dan non perizinan		1 1 0 0 0 k 0 s u lt a s i	1 2 0 0 0 k 0 s u lt a si	1 3 0 0 0 k 0 s u lt a si	1 4 0 0 k 0 s u lt a si	1 5 0 0 k o s u lt a si

				7	Targe	et						Т	`arge	t							Targe	et						7	 Carge	et	
N	Indikator Kinerja Utama	Baseli ne 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Base line 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026
																								Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaa n pengaduan		3 1 a y a n a n	3 la y a n a n	3 la y a n a n	3 la y a n a n	3 la y a n a n
																								Koordinasi dan Sinkronisas i Penetapan pemberian Fasilitas/In sentif Daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisas i penetapan pemberian fasilitas/in sentif daerah		3 k a li	3 k al i	3 k al i	3 k al i	3 k al i
								Program Pengelola an Data dan Sistem Informasi Penanam an Modal	Persentas e pemenuh an data dan sistem informasi yang dibutuhk an untuk kemudah an penanam an modal dan pelayana n perizinan	100	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	Pengelola an Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegr asi pada Tingkat Daerah Kabupat en/Kota	Jumlah Lapora n		2 k a li	2 k al i	2 k al i	2 k al i	2 k al i	Pengolahan , Penyajian dan Pemanfaata n Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengemban gan aplikasi perizinan dan non perizinan		1 p a k e t	1 p a k et	1 p a k et	1 p a k et	1 p a k et

					,	Targe	et						Т	`arge	t						,	Targe	et .						,	Targe	et	
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseli ne 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Base line 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026
									Pengenda lian Pelaksan aan Penanam an Modal	Persentas e peningka tan perusaha an yang tertib pelapora n LKPM	18,18	1 9 , 2 6	1 9 , 9 1	2 1	2 1 , 6 5	3	Pengend alian Pelaksan aan Penanam an Modal yang menjadi Kewenan gan Daerah Kabupat en/Kota	Jumlah Pelapor an LKPM		3 O per u sahaan	3 5 perusahaan	4 0 p e r u s a h a a n	45 perusahaan	5 O p e r u s a h a a n	Koordinasi dan Sinkronisas i Pemantaua n Pelaksanaa n Penanaman Modal	Jumlah Pemantaua n Pelaksanaa n Penanama n Modal (Perusahaa n)		2 0 p e r u s a h a a n	25 perusahaan	2 8 perus ahaan	3 O p e r u s a h a a n	3 5 perus ahaan
																									Koordinasi dan Sinkronisas i Pembinaan Pelaksanaa n Penanaman Modal	Jumlah Pembinaan Pelaksanaa n Penanama n Modal (Pelaku Usaha)		1 0 0 (Pe lakuUsahaa)	1 0 5 (P el a k u U s a h a)	1 1 0 (PelakuUsaha)	1 1 5 (P el a k u U s a h a)	1 2 0 (P el a k u U s a h a)

					7	Γarge	et						Т	arge	et							Targ	et						7	arge	et	
N o		Indikator Kinerja Utama	Baseli ne 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Base line 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026
																									Koordinasi dan Sinkronisas i Pengawasa n Pelaksanaa n Penanaman Modal	Jumlah Pengawasa n Pelaksanaa n Penanama n Modal (Perusahaa n)		2 0 (Perusahaan)	25 (Perusahaan)	2 8 (P e r u s a h a a n)	3 0 (Perusahaan)	3 5 (P e r u s a h a a n)
																										Jumlah pengawas an pemenuh an kewajiban pelaksana an kegiatan berusaha		1 2 0	1 3 0	1 4 0	1 5 0	1 6 0
2	Meningk atnya Kapasita s kelemba gaan Perangka t daerah	Nilai Sakip DPMPTS P	82,18	8 2, 3 0	8 2 , 6 0	8 2 , 9 0	8 3, 2 0	8 5 ,5 0	PROGRA M PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAH DAERAH KABUPA TEN/KO TA	Persentas e penunjan g urusan pemerint ahan yang terpenuhi sesuai standar	100	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	0	Administ rasi Keuanga n Perangka t Daerah	Kebutu han adminis trasi keuang an perang kat daerah		1 2 b u 1 a n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Pembayara n gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun		1 2 b u 1 a n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n

						Targ	et						Т	arge	t							Targe	et						7	arge		
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseli ne 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Base line 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026
																									Penyediaan Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN	Pembayara n kebutuhan jasa administra si perkaantor an		1 2 b u l a n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	b u la
																	Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Kebutu han adminis trasi perkant oran perang kat daerah		1 2 b u 1 a n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/pen erangan bangunan kantor		1 2 b u 1 a n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	b u la
																									Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkap an kantor		0	0	0	0	0
																									Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah kebutuhan BBM untuk operasional		5 0 0 li t e r	5 0 0 li te r	5 0 0 li te r	5 5 0 0 1i te r	5 0 0 li
																									Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah perlatan rumah tangga		1 p a k e t	1 p a k et	1 p a k et	1 p a k et	1 p a k et

				,	Targ	et						Т	arge	t						,	Targe	et						Т	arge	t	
N o	Indikator Kinerja Utama	Baseli ne 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Base line 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026
																								Penyediaan barang cetakan dan pengganda an	Jumlah Kebutuhan barang cetakan dan pengganda an		1 2 b u 1 a	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n
																								Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bacaan untuk pelayanan publik		1 2 b u 1 a	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n
																								Penyediaan bahan / Material	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor		1 2 b u 1 a	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n
																								Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman		1 2 b u 1 a	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n
																								Penyelengg araan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kebutuhan rapat-rapat untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah		1 2 b u 1 a n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n

.

						Targe	et						Т	arge	t						,	Targe	et						,	Targe	et	
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseli ne 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Base line 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026
																	Pengada an Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerint ah Daerah	Jumlah Pengad aan Barang Milik Daerah		3 p a k e t	3 p a k et	3 p a k et	3 p a k et	3 p a k et	Pengadaan Aset Tak Berwujud	jumlah pengadaan aplikasi		1 p a k e t	0	0	0	0
					5																				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 p a k e t	0	0	0	0
																									Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 p a k e t	0	0	0	0
																	Penyedia an jasa Penunja ng Urusan Pemerint ahan Daerah	kebutu han layanan adminis trasi perkant oran perang kat		1 2 b u 1 a	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	u	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan materai		1 2 b u 1 a n	2 b u	la	2 b u	b u la

					Т	l'arge	et						Т	arge	et .						,	Targe	et						Т	`arge	÷t	
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseli ne 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Base line 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026
																		daerah														
																									Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik	kebutuhan pembayara n jasa listrik, dan air		1 2 b u 1 a n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n
																									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan jasa kliring dan pembelian cek		1 2 b u 1 a	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n
																	Pemeliha raan Barang milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerint ahan Daerah	kebutu han pemelih araan kendar aan dinas / operasi onal , pemelih araan peralat an kantor lainnya pemelih araan gedung kantor		1 2 b u 1 a n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasiona 1 atau Lapangan	kebutuhan jasa pemelihara an, biaya pemelihara an, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		1 5 k e n d a r a a n	1 5 k e n d a r a a n	1 5 k e n d a r a a n	1 5 k e n d a r a a n	1 5 k e n d a r a a n

						Targ	et						Т	`arge	t						Г	arge	t					Ta	arget		
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseli ne 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Base line 2020	2022	2023	2024	2025	Sub Kegiatar	Indikator Sub Kegiatan	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026
																								Pemeliha an Peralata dan Mesi Lainnya	jasa pemelihara		1 2 b u 1 a	b u la	1 2 b u la n	la	1 2 b u la n
																								Pemelihar an / Rehabilita Gedung Kantor da Banguna Lainnya	an Gedung kantor		1 p a k e t	a k	1 p a k et	1 p a k et	1 p a k et

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

DPMPTSP

RELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABURATEN BOYOLALI

PURNAWAN RAHARJO, S.Pd., M.M.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR: 910 /00667 Tahun 2022

TANGGAL: (0 Januari 2022

CASCADE INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021-2026

					,	Targe	et							Carge	et						Ť	Targe	et						7	arge	et	
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseli ne 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Base line 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	9006
1	Meningk atnya nilai investasi	Realisasi Penanam an Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam an Modal Asing (PMA) (dalam juta rupiah)	1675 461,7	1 7 1 1 5 1 1, 5 9	1 7 7 1 1 0 9 , 2 6	1 8 3 0 7 0 6 , 9 3	1 8 9 0 3 0 4, 6	1 9 4 9 9 0 2 , 2 6	Program Promosi Penanam an Modal	Persentas e promosi potensi investasi yang ditindak lanjuti dengan penjajaka n kerjasam a investasi	25	3 0		4 0	4 5	5 0	Penyelen ggaraan Promosi Penanam an Modal yang menjadi Kewenan gan Daerah Kabupat en/Kota	Jumlah Kegiata n promosi penana man modal		3 k e g	3 k e g	3 k e g	3 k e g	3 k e g	Pelaksanaa n Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Kegiatan promosi penanama n modal		2 k e g	2 k e g	2 k e g	2 k e g	k e
																									Penyusuna n Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi promosi penanama n modal		1 d o k	1 d o k	1 d o k	1 d o k	
									Program Promosi Penanam an Modal	Persentas e realiasi investasi di wilayah utara	29	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4										Jumlah Kemitraan antara industri besar dan UMKM		1 k e g	1 k e g	1 k e g	1 k e g	е

					1	rarge	et						Т	arge	t						7	Targe	et						Т	arge	et	
N	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseli ne 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Base line 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026
									Program Pengemb angan Iklim Penanam an Modal	Persentas e peningka tan potensi investasi yang teridentifi kasi	50	5 8	6 3	6 5	7 1	7 5	Penetapa n Pemberia n Fasilitas /Insentif Dibidang Penanam an Modal yang menjadi Kewenan gan Daerah Kabupat en/Kota	Jumlah Dokum en fasilitas /Insent if Di bidang penana man Modal		1 d o k	1 d o k	1 d o k	1 d o k	1 d o k	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/In sentif dan Kemudaha n Penanaman Modal	Jumlah Dokumen pemberian fasilitas/in sentif dan kemudaha n penanama n modal		1 d o k	1 d o k	1 d o k	1 d o k	1 d o k
																									Evaluasi Pelaksanaa n Pemberian Fasilitas/In sentif dan Kemudaha n Penanaman Modal	jumlah laporan evaluasi pelaksanaa n pemberian fasilitas / insentif dan kemudaha n penanama n modal		4 1 a p o r a n	4 la p o r a n	4 la p o r a n	4 la p o r a n	4 la p o r a n
																	Pembuat an Peta Potensi Investasi Kabupat en/Kota	Jumlah Dokum en Peta Potensi Investa si		1 p a k e t	1 p a k et	1 p a k et	1 p a k et	1 p a k et	Penyusuna n Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanama n Modal Kabupaten Boyolali		0	0	0	0	0

					,	Targ	get						Т	'arge	et							Γarge	et						Т	arge	t	
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseli ne 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Base line 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026
																									Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi		1 p a k e t	1 p a k et	1 p a k et	1 p a k et	1 p a k et
																										Jumlah profil investasi		1 p a k e t	1 p a k et	1 p a k et	1 p a k et	1 p a k et
									Program Pelayana n Penanam an Modal	IKM Perizinan Investasi	82,46	8 2 , 5 5	8 n , 5	8 4 , 5 5	8 5	8 6	Pelayana n Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanam an Modal yang menjadi Kewenan gan Daerah Kabupat en/ Kota	Jumlah Penerbi tan perizina n dan non perizina n		1 0 0 0 0 0 i z i n u s a h a	1 1 0 0 0 iz i n u s a h a	1 2 0 0 0 iz i n u s a h a	1 3 0 0 0 iz i n u s a h a	1 4 0 0 0 iz i n u s a h a	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizin an berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Konsultasi perizinan dan non perizinan		1 1 0 0 0 k 0 s u lt a s i	1 2 0 0 0 k 0 s u lt a si	1 3 0 0 k o s u lt a si	1 4 0 0 0 k 0 s u lt a si	1 5 0 0 k o s u lt a si

					,	Targe	et						7	`arge	et			E 227				Targ	et						7	l'arge	et	
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseli ne 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Base line 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026
																									Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaa n pengaduan		3 l a y a n a n	3 la y a n a n	3 la y a n a n	3 la y a n a n	3 la y a n a n
																									Koordinasi dan Sinkronisas i Penetapan pemberian Fasilitas/In sentif Daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisas i penetapan pemberian fasilitas/in sentif daerah		3 k a li	3 k al i	3 k al i	3 k al i	3 k al i
									Program Pengelola an Data dan Sistem Informasi Penanam an Modal	Persentas e pemenuh an data dan sistem informasi yang dibutuhk an untuk kemudah an penanam an modal dan pelayana n perizinan	100	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	0	Pengelola an Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegr asi pada Tingkat Daerah Kabupat en/Kota	Jumlah Lapora n		2 k a li	2 k al i	Pengolahan , Penyajian dan Pemanfaata n Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengemban gan aplikasi perizinan dan non perizinan		1 p a k e t	1 p a k et	1 p a k et	1 p a k et	1 p a k et			

						Targ	get						7	Targe	t						Т	Targe	et						Т	arge	t	
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseli ne 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Base line 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026
									Pengenda lian Pelaksan aan Penanam an Modal	Persentas e peningka tan perusaha an yang tertib pelapora n LKPM	18,18	1 9 , 2 6	1 9 , 9 1	2 1	2 1 , 6 5	3	Pengend alian Pelaksan aan Penanam an Modal yang menjadi Kewenan gan Daerah Kabupat en/Kota	Jumlah Pelapor an LKPM		3 O per u sahaan	3 5 per usahaan	4 O p e r u s a h a a n	4 5 perusahaan	5 O per u sah aan	Koordinasi dan Sinkronisas i Pemantaua n Pelaksanaa n Penanaman Modal	Jumlah Pemantaua n Pelaksanaa n Penanama n Modal (Perusahaa n)		2 O per u sahaan	2 5 perus ahaan	2 8 p e r u s a h a n	O p e r u s a h a a	3 5 perusahaan
																									Koordinasi dan Sinkronisas i Pembinaan Pelaksanaa n Penanaman Modal	Jumlah Pembinaan Pelaksanaa n Penanama n Modal (Pelaku Usaha)		1 0 0 (P e 1 a k u U s a h a)	1 0 5 (P el a k u U s a h a)	1 1 0 (Pel a k u U s a h a)	1 5 (P el a k u U s a h	120 (PelakuUsaha)

						rarge	et						T	arge	et						X	Targ	et						7	Targe	et	
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseli ne 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Base line 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026
																									Koordinasi dan Sinkronisas i Pengawasa n Pelaksanaa n Penanaman Modal	Jumlah Pengawasa n Pelaksanaa n Penanama n Modal (Perusahaa n)		2 0 (Perusahaan)	25 (Perusahaan)	28 (Perusahaan)	3 0 (Pe r u s a h a a n)	35 (P e r u s a h a a n)
																										Jumlah pengawas an pemenuh an kewajiban pelaksana an kegiatan berusaha		1 2 0	3 0	1 4 0	1 5 0	1 6 0
2	Meningk atnya Kapasita s kelemba gaan Perangka t daerah	Nilai Sakip DPMPTS P	82,18	8 2, 3 0	8 2 , 6 0	9 0	8 3, 2 0	8 5 , 5 0	PROGRA M PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAH DAERAH KABUPA TEN/KO TA	Persentas e penunjan g urusan pemerint ahan yang terpenuhi sesuai standar	100	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	0	Administ rasi Keuanga n Perangka t Daerah	Kebutu han adminis trasi keuang an perang kat daerah		1 2 b u 1 a n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Pembayara n gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun		1 2 b u 1 a n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n

					1	rarge	et						Та	arget	t						7	`arge	t						Т	`arge	t	
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseli ne 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Base line 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026
																									Penyediaan Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN	Pembayara n kebutuhan jasa administra si perkaantor an		1 2 b u 1 a n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n
																	Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Kebutu han adminis trasi perkant oran perang kat daerah		1 2 b u 1 a n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/pen erangan bangunan kantor		1 2 b u 1 a n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n
																									Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkap an kantor		0	0	0	0	0
																									Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah kebutuhan BBM untuk operasional		5 5 0 0 li t e r	5 5 0 0 li te r	5 5 0 0 li te r	5 5 0 0 li te r	5 5 0 0 li te r
																									Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah perlatan rumah tangga		1 p a k e t	1 p a k et	1 p a k et	1 p a k et	1 p a k et

					,	Targ	et						Т	arge	t						0	Targe	et						Т	arge	et	
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseli ne 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Base line 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026
																									Penyediaan barang cetakan dan pengganda an	Jumlah Kebutuhan barang cetakan dan pengganda an		1 2 b u 1 a n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n
																									Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bacaan untuk pelayanan publik		1 2 b u 1 a	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n
																									Penyediaan bahan / Material	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor		1 2 b u 1 a	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n
																									Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman		1 2 b u 1 a	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n
																									Penyelengg araan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kebutuhan rapat-rapat untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah		1 2 b u 1 a n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n

.

					,	Targe	t						Т	arge	et						,	Γarge	t:t						7	arge	et	
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseli ne 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Base line 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026
																	Pengada an Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerint ah Daerah	Jumlah Pengad aan Barang Milik Daerah		3 paket	3 p a k et	3 p a k et	3 p a k et	3 p a k et	Pengadaan Aset Tak Berwujud	jumlah pengadaan aplikasi		1 p a k e t	0	0	0	0
																									Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 p a k e t	0	0	0	0
																									Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 p a k e t	0	0	0	0
																	Penyedia an jasa Penunja ng Urusan Pemerint ahan Daerah	kebutu han layanan adminis trasi perkant oran perang kat		1 2 b u 1 a	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan materai		1 2 b u 1 a	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n

						Targ	get							Т	`arge	et						Į.	Targe	et						7	`arge	t	
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseli ne 2020	2022	2023	2024	2002	2025	2026	Program	Indikator Program	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Base line 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026
					1				1										daerah														
																										Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik	kebutuhan pembayara n jasa listrik, dan air		1 2 b u 1 a n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n
																										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan jasa kliring dan pembelian cek		1 2 b u 1 a	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n
																		Pemeliha raan Barang milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerint ahan Daerah	kebutu han pemelih araan kendar aan dinas / operasi onal , pemelih araan peralat an kantor lainnya pemelih araan gedung kantor		1 2 b u 1 a n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasiona 1 atau Lapangan	kebutuhan jasa pemelihara an, biaya pemelihara an, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		1 5 k e n d a r a a n	1 5 k e n d a r a a n	1 5 k e n d a r a a n	1 5 k e n d a r a a n	1 5 k e n d a r a a n

						Targ	get						Т	arge	t			0.040			7	`arge	t						Т	`arge	t	
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseli ne 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Base line 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Basel ine 2020	2022	2023	2024	2025	2000
																									Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	Kebutuhan jasa pemelihara an peralatan kantor		1 2 b u 1 a n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	1 2 b u la n	b u
																									Pemelihara an / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemelihara an Gedung kantor		1 p a k e t	1 p a k et	1 p a k et	1 p a k et	1 F a k

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

RABURATEN BOYOLALI

PURNAWAN RAHARJO, S.Pd., M.M.

DPMPTSP E

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	BIDANG PENGAMPU
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya nilai investasi	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp. 1.830.706.930.000	Semua Bidang
2	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah	2 Nilai Sakip DPMPTSP	Nilai 82,90	Sekretariat

BOYOLALI, JANUARI 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN FERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI

PURNAWAN RAHARNO, S.Pd., M.M. Rembina Utama Muda NIP. 19690414 199403 1 007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: PURNAWAN RAHARJO, S.Pd., M.M.

Jabatan

: Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Boyolali.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: MOHAMMAD SAID HIDAYAT, S.H.

Jabatan

: Bupati Boyolali.

Selaku atasan langsung pihak pertama. selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

MOHAMMAD SAID HIDAYAT, S.H.

Boyolali, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

PURNAWAN RAHARJO, S.Pd., M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19690414 199403 1 007

PERJANJIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	BIDANG PENGAMPU
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp. 1.830.706.930.000	Semua Bidang
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 Nilai Sakip DPMPTSP	Nilai 82,90	Sekretariat

NO	PROGRAM		ANGGARAN	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp	4.099.904.000,00	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp	35.000.000,00	
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp	55.000.000,00	
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp	30.000.000,00	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp	583.883.000,00	
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp	100.000.000,00	
	TOTAL ANGGARAN	Rp	4.903.787.000,00	

Boyolali, Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI

PURNAWAN RAHARJO, S.Pd., M.M.
Pemuina Utama Muda
NIP. 19690414 199403 1 007

MOHAMMAD SAID HIDAYAT, S.H.

* BUPATI BOYOLALI

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

	0 01 1 :	1 11 4 12 -	T4 T-1 0000						T	arget					
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	investasi	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp 1.830.706.930.000			450.000.000.000			900.000.000.000			1.350.000,000.000			1.830.706.930.00
	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Nilai 82,90												82,90

BOYOLALI, / JANUARI 2024

KEPALA DINAS FENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI

PURNAWAN RAY RJO, S.Pd., M.M.
Pembina Lama Muda
NIP. 196904 199403 1 007

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024 TRIWULAN I

				JAN	JARI	FEBR	UARI	MA	RET	CAPAIAN S/D	ALASAN KETIDAKTERCAPAIAN/	PEROMENDAG
No	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	MARET	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDAS
1	2	3	4	5	6	7	" 8	9	10	11	12	, 13
1	Meningkatnya Nilai Investasi		Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)					450.000.000.000,00	606.086.472.083,00	33,11%		
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi potensi investasi yang ditindak lanjuti dengan penjajakan kerjasama investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	*	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Perizinan Investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan perusahaan yang tertib pelaporan LKPM	15%	15%	5%	5%	5%	5%	25%		400
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaran Pemerintah Daerah		Nilai Sakip				, 7			0%	Masih dalam proses Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Insperktorat Kabupaten Boyolali	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusah pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

BOYOLALI, MARET 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI

PURNAWAN RAHARJO, S.Pd., M.M. Pembina Utama Muda NIP, 196904 14 199403 1 006

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024 TRIWULAN II

		PROGRAM	INDIKATOR	APRIL		MEI		JUNI		CAPAIAN S/D	ALASAN KETIDAKTERCAPAIAN/	PERCHENDAD
No	SASARAN			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	JUNI	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya Nilai Investasi		Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)					900.000.000,000	964.996.788.921,00	52,71%		
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi potensi investasi yang ditindak lanjuti dengan penjajakan kerjasama investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Perizinan Investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		,
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan perusahaan yang tertib pelaporan LKPM	15%	15%	5%	5%	5%	5%	50%		
gagliginasininasani		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaran Pemerintah Daerah		Nilai Sakip					82,90	83,20	100,36%		Y.
STOCKHOLOGIA		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		V.

BOYOLALI, JUNI 2024

KEPALA DINAS PÉNANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATÉN BOYOLALI

PURNAWAN RAHARJO, S.Pd., M.M. Pembina Urama Muda NIP. 19690414 199403 1 006

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024 TRIWULAN III

***********	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	JULI		AGUSTUS		SEPTI	MBER	CAPAIAN S/D	ALASAN KETIDAKTERCAPAIAN/	
No				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	SEPTEMBER	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	. 11	12	13
1	Meningkatnya Nilai Investasi		Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)					1.350.000.000.000,00	2.712.203.405.442,00	148,15%		
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi potensi investasi yang ditindak lanjuti dengan penjajakan kerjasama investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Perizinan Investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan perusahaan yang tertib pelaporan LKPM	15%	15%	5%	5%	5%	5%	75%		
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaran Pemerintah Daerah	. *	Nilai Sakip	,	,		, ,			100,36%	Sudah dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Insperktorat Kab Boyolali pada TW II	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusah pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

BOYOLALI, SEPTEMBER 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BOYOLALI

PURNAWAN RAFARJO, S.Pd., M.M.
Pembina Urama Muda
NIP: 19690414 199403 1 006

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024 TRIWULAN IV

		PROGRAM	INDIKATOR	OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER		CADAIANISID	ALASAN KETIDAKTERCAPAIAN/	
No				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN S/D DESEMBER	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Nilai Investasi		Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)			,		1.830.706.930.000,00	3.045.473.744.959,00	166,36%		
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi potensi investasi yang ditindak lanjuti dengan penjajakan kerjasama investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Program Pengembangan Iklim Penananan Modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Perizinan Investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan perusahaan yang tertib pelaporan LKPM	15%	15%	5%	5%	5%	5%	100%		
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaran Pemerintah Daerah		Nilai Sakip							100,36%	Sudah dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Insperktorat Kab Boyolali pada TW II	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

BOYOLALI, DESEMBER 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI

PURNAWAN RATARJO, S.Pd., M.M.
Pembira Utama Muda
NIR 19690414 199403 006

PENGUKURAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI

Nama Perangkat Daerah

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun Anggaran

: 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	
1	2	3		4	5	6	
1	Meningkatnya nilai investasi	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp.	1.830.706.930.000	3.045.473.744.959	166,36%	
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2 Nilai Sakip DPMPTSP	Nilai	82,90	83,20	100,36%	

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2024 JUMLAH REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 Rp

4.903.787.000,00

Rp

4.819.139.730,00

BOYOLALI, JANUARI 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI

PURNAWAN RAHARJO, S.Pd., M.M.
Pembina utama Muda

NIP. 19690414 199403 1 009



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Memberikan Penghargaan Kepada

KABUPATEN BOYOLALI

Sebagai Kategori

SANGAT BAIK

Atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Rosan Perkasa Roeslani





PIAGAM PENGHARGAAN

PENGANUGERAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK) **TAHUN 2024**

DIBERIKAN KEPADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI

Jakarta, 14 November 2024 Ketua Ombudsman Republik Indonesia

Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph..D.

98.68 NILAI ZONA HIJAU KUALITAS TERTINGGI